



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 38 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 134 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dalam merencanakan pembangunan Kabupaten Purworejo dan menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;

1	2	3	4	5	6	7

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

1	f	2	g	3	h	4	i	5	j	6	k	7	l
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 11);
- 10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo ahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 134 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026.

1	2	3	4	5	6	7
f	l	z	h	g	b.	i

Pasal I

Ketentuan angka 1.2. Bab I dan tabel 6.1 Bab VI dalam Lampiran Peraturan Bupati Purworejo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 134 Seri E Nomor 64) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.


SABUTAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 Juni 2022

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 24 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 38 SERI E NOMOR 34**

1	+	2	←	3	2	4	2	5	2	6	2	7	i
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 134 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

- 1.2. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun

1	1	2	1	3	2	4	2	5	1	6	1	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
16. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 17. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1902);
 22. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1747);
 23. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
 24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian

1	f	2	e	3	z	4	a	5	d	6	b.	7	i
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---

- Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1481);
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1747), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 84);
 26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4)
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo

1	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

- Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Purworejo (lembaran daerah kabupaten purworejo tahun 2021 Nomor 14);
 34. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 4;
 35. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 97);
 36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1	f	2	k	3	a ₂	4	a	5	10	6	b.	7	i
---	---	---	---	---	----------------	---	---	---	---------------	---	----	---	---

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purworejo

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
		UR	B/D	A	F	K				O	B	2020 Realisasi	2021 Realisasi	2022		2023		2024		2025		2026				Target	Pagu (Rp.)
														Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)				
1	2						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Peningkatan Nilai Investasi					3			Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%		1,92	74%	10%		10%			10%		10%			50%				
	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal							Realisasi Penanaman Modal	Miliar		73 M	45,79 M	67,65M		74,41M		81,85M		90M		99M			412,91 M			
		2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	%		-	-	8%	195.000.000	8%	141.000.000	8%	154.000.000	8%	159.000.000	8%	158.000.000		807.000.000	DPMP TSP	Kab.Purworejo	
		2	18	2	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Ketersediaan Regulasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dokumen				1 Dokumen	195.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	154.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000	5 Dokumen	589.000.000			
								Hasil : Tersusunnya Regulasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dokumen																		
		2	18	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen				1 Dokumen	195.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	154.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000		549.000.000			
		2	18	2	2.01	2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kegiatan Usaha									15 Kegiatan Usaha	20.000.000	15 Kegiatan Usaha	20.000.000		40.000.000				
		2	18	2	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Keluaran : Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	Dokumen						1 Dokumen	41.000.000			1 Dokumen	89.000.000	1 Dokumen	88.000.000	3 Dokumen	218.000.000			
								Hasil : Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten																			
		2	18	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen						1 Dokumen				1 Dokumen	59.000.000	1 Dokumen	58.000.000	3 Dokumen	117.000.000			
		2	18	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang uluh Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen						1 Dokumen	41.000.000			1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	101.000.000			
		2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Nomor Induk Berusaha yang Terbit terhadap Jumlah Kepeminatan	%		99,84%	100%	99,80%	183.000.000	99,8 %	132.000.000	99,50%	145.000.000	99,50%	149.000.000	99,50%	148.000.000	500%	757.000.000	DPMP TSP	Kab.Purworejo	
		2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Persentase Iain Usaha Terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	%				99,80%	183.000.000	99,8 %	132.000.000	99,50%	145.000.000	99,50%	149.000.000	99,50%	148.000.000	500%	757.000.000			
								Hasil : Terlaksananya Iain Usaha Terhadap Kepeminatan Penanaman Modal																			
		2	18	3	2.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen				1 Dokumen	83.000.000	1 Dokumen	66.000.000	1 Dokumen	72.400.000	1 Dokumen	74.500.000	1 Dokumen	74.000.000	5 Dokumen	369.900.000			
		2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen				1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	66.000.000	1 Dokumen	72.600.000	1 Dokumen	74.500.000	1 Dokumen	74.000.000	5 Dokumen	387.100.000			
		2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria	%		100%	100%	100%	380.000.000	100%	274.000.000	100%	301.000.000	100%	309.000.000	100%	308.000.000	500%	1.572.000.000	DPMP TSP	Kab.Purworejo	
		2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran : Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	%				100%	380.000.000	100%	274.000.000	100%	301.000.000	100%	309.000.000	100%	308.000.000	500%	1.572.000.000			

1 f | 2 A | 3 | 4 8 | 5 0 | 6 2. | 7 i

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode						Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi			
		UR	B/	U	P	K					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Pagu (Rp.)					
													Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)							
1	2				3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
								Hasil : Terlaksananya Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan																					
			2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha			2500 Pelaku Usaha	200.000.000	2500 Pelaku Usaha	68.500.000	2500 Pelaku Usaha	75.250.000	2500 Pelaku Usaha	77.250.000	2500 Pelaku Usaha	77.000.000	12500 Pelaku Usaha	498.000.000					
			2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha			20 Kegiatan Usaha	100.000.000	25 Kegiatan Usaha	68.500.000	30 Kegiatan Usaha	75.250.000	35 Kegiatan Usaha	77.250.000	40 Kegiatan Usaha	77.000.000	150 Kegiatan Usaha	398.000.000					
			2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang			20 Orang	40.000.000	25 Orang	68.500.000	30 Orang	75.250.000	35 Orang	77.250.000	40 Orang	77.000.000	150 Orang	338.000.000					
			2	18	4	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kegiatan Usaha			30 Kegiatan Usaha	40.000.000	35 Kegiatan Usaha	68.500.000	40 Kegiatan Usaha	75.250.000	45 Kegiatan Usaha	77.250.000	50 Kegiatan Usaha	77.000.000	200 Kegiatan Usaha	338.000.000					
			2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Ketentuan NSPK	%	100%	100%	100%	402.000.000	100%	290.000.000	100%	318.000.000	100%	327.000.000	100%	328.000.000	500%	1.665.000.000	DPMPPTSP	Kab.Purwor			
			2	18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Persentase Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan	%			100%	402.000.000	100%	290.000.000	100%	318.000.000	100%	327.000.000	100%	328.000.000	500%	1.665.000.000					
								Hasil : Terpenuhinya Ketentaaan Perizinan Berusaha																					
			2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha			8 Pelaku Usaha	268.000.000	8 Pelaku Usaha	250.000.000	8 Pelaku Usaha	212.000.000	8 Pelaku Usaha	218.000.000	8 Pelaku Usaha	218.000.000	40 Pelaku Usaha	1.166.000.000					
			2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha			249 Kegiatan Usaha	134.000.000	249 Kegiatan Usaha	40.000.000	249 Kegiatan Usaha	106.000.000	249 Kegiatan Usaha	109.000.000	249 Kegiatan Usaha	110.000.000	1.245 Kegiatan Usaha	499.000.000					
			2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Didisainkan	%	100%	100%	100%	120.000.000	100%	87.000.000	100%	95.000.000	100%	98.000.000	100%	97.000.000	500%	497.000.000	DPMPPTSP	Kab.Purwor			
			2	18	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Dokumen			1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	87.000.000	1 Dokumen	95.000.000	1 Dokumen	98.000.000	1 Dokumen	97.000.000	5 Dokumen	497.000.000					
								Hasil : Terkelolanya Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi																					
			2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen			4 Dokumen	120.000.000	4 Dokumen	87.000.000	4 Dokumen	95.000.000	4 Dokumen	98.000.000	4 Dokumen	97.000.000	20 Dokumen	497.000.000					
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik								Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah					88		88		88		88		88		440						
	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik							Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah					88		88		88		88		88		440						
		X	XX	1				PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penujang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	%	100%	100%	100%	2.267.376.604	100%	2.362.359.718	100%	2.596.313.580	100%	2.666.719.992	100%	2.680.674.004	500%	12.573.443.898	DPMPPTSP	Kab.Purwor			
		X	XX	1	201			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen			7 Dokumen	19.750.000	7 Dokumen	21.725.000	7 Dokumen	23.897.500	7 Dokumen	26.287.250	7 Dokumen	28.915.975	120 Dokumen	120.575.725					
								Hasil : Tersusunanya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
		X	XX	1	201	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			16 Dokumen	5.250.000	16 Dokumen	5.775.000	16 Dokumen	6.352.500	16 Dokumen	6.987.750	16 Dokumen	7.686.525	80 Dokumen	32.051.775					
		X	XX	1	201	2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen			1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	1.650.000	1 dokumen	1.815.000	1 dokumen	1.996.500	1 dokumen	2.196.150	5 Dokumen	9.157.650					

1 f

2 e

3

4 g

5 d

6 b.

7 i

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
		UR	R	D	A	B				2020		2021		2022		2023		2024		2025						2026
										Realisasi	Realisasi	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)			
										7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	2	X	XX	1	3	201	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen			1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	1.650.000	1 dokumen	1.815.000	1 dokumen	1.996.500	1 dokumen	2.196.150	5 Dokumen	9.157.650		
		X	XX	1	201	4	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen			1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.200.000	1 dokumen	2.420.000	1 dokumen	2.662.000	1 dokumen	2.928.200	5 Dokumen	12.210.200		
		X	XX	1	201	5	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen			1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.200.000	1 dokumen	2.420.000	1 dokumen	2.662.000	1 dokumen	2.928.200	5 Dokumen	12.210.200		
		X	XX	1	201	6	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			16 laporan	2.500.000	16 laporan	2.750.000	16 laporan	3.025.000	16 laporan	3.327.500	16 laporan	3.660.250	80 laporan	15.262.750		
		X	XX	1	201	7	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan			5 laporan	5.000.000	5 laporan	5.500.000	5 laporan	6.050.000	5 laporan	6.655.000	5 laporan	7.320.500	25 laporan	30.525.500		
		X	XX	1	202			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%			100%	1.943.217.104	100%	2.005.784.268	100%	2.204.080.588	100%	2.235.263.698	100%	2.206.072.080	500%	10.594.417.735		
									Hasil : Terlaksananya Administrasi Keuangan																	
		X	XX	1	202	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan			19 Orang/ Bulan	1.920.445.104	19 Orang/ Bulan	1.980.735.068	19 Orang/ Bulan	2.176.526.465	19 Orang/ Bulan	2.204.954.166	19 Orang/ Bulan	2.172.731.595	95 Orang/ Bulan	10.455.392.397		
		X	XX	1	202	5	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan			6 Laporan	2.000.000	6 Laporan	2.200.000	6 Laporan	2.420.000	6 Laporan	2.662.000	6 Laporan	2.928.200	30 Laporan	12.210.200		
		X	XX	1	202	7	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan			24 Laporan	18.772.000	24 Laporan	20.649.200	24 Laporan	22.714.120	24 Laporan	24.985.532	24 Laporan	27.484.085	120 Laporan	114.604.937		
		X	XX	1	202	8	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen			2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.200.000	2 Dokumen	2.420.000	2 Dokumen	2.662.000	2 Dokumen	2.928.200	10 Dokumen	12.210.200		
		X	XX	1	205			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%			100%	29.000.000	100%	31.900.000	100%	35.090.000	100%	38.599.000	100%	42.458.900	500%	177.047.900		
									Hasil : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian																	
		X	XX	1	205	9	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang			20 Orang	29.000.000	20 Orang	31.900.000	20 Orang	35.090.000	20 Orang	38.599.000	20 Orang	42.458.900	100 Orang	177.047.900		
		X	XX	1	206			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran : Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%			100%	142.000.400	100%	156.200.440	100%	171.820.484	100%	189.002.532	100%	207.902.786	500%	866.926.642		
									Hasil : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat																	
		X	XX	1	206	9	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			1 Laporan	142.000.400	1 Laporan	156.200.440	1 Laporan	171.820.484	1 Laporan	189.002.532	1 Laporan	207.902.786	5 Laporan	866.926.642		
		X	XX	1	207			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	Jenis			5 Jenis	-	5 Jenis	-	5 Jenis	-	5 Jenis	-	5 Jenis	-	5 Jenis	5 Jenis		
		X	XX	1	207	1	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit							1 Unit	400.000.000*								
		X	XX	1	207	10	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			905 Unit	2.000.000.000*												
		X	XX	1	208			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan			3 Laporan	72.214.500	3 Laporan	79.435.950	3 Laporan	87.379.546	3 Laporan	96.117.500	3 Laporan	105.729.249	15 Laporan	440.876.744		
									Hasil : Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
		X	XX	1	208	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan			1 Laporan	23.484.500	1 Laporan	25.832.950	1 Laporan	28.416.245	1 Laporan	31.257.870	1 Laporan	34.383.656	5 Laporan	143.375.221		
		X	XX	1	208	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			1 Laporan	30.500.000	1 Laporan	33.550.000	1 Laporan	36.905.000	1 Laporan	40.595.500	1 Laporan	44.655.050	5 Laporan	186.205.550		
		X	XX	1	208	3	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			1 Laporan	18.230.000	1 Laporan	20.053.000	1 Laporan	22.058.300	1 Laporan	24.264.130	1 Laporan	26.690.543	5 Laporan	111.295.973		

1 ✓ | 2 ✗ | 3 | 4 ✗ | 5 ✗ | 6 ✗ | 7 i

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	UR	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/ Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
			B/	P	K	M	U				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026					
													Realisasi	Realisasi	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)		
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		X	XX	1		209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Jenis			2 Jenis	61.194.600	2 Jenis	67.314.060	2 Jenis	74.045.466	2 Jenis	81.450.013	2 Jenis	89.595.014	6 Jenis	373.599.152		
									Hasil : Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
		X	XX	1		209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			8 Unit	35.786.600	8 Unit	39.365.260	8 Unit	43.301.786	8 Unit	47.631.965	8 Unit	52.395.161	40 Unit	218.480.772		
		X	XX	1		209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			80 unit	25.408.000	80 unit	27.948.800	80 unit	30.743.680	80 unit	33.818.048	80 unit	37.199.853	400 Unit	195.118.361		

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal

† BUPATI PURWOREJO,


AGUS BASTIAN